

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Republika

# Rumah DP Rp 0 Distop, DKI Diminta Bangun Rusunawa

DKI menganggarkan Rp1,22 triliun untuk penanganan kawasan kumuh dan pembangunan rusunawa.

■ ZAINUR MAHSIR RAMADHAN

JAKARTA — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Gembong Warsono menilai, program rumah dengan uang muka atau *down payment* (DP) Rp 0 yang diinisiasi mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, dia meminta APBD DKI untuk sektor perumahan diarahkan dan difokuskan untuk pengadaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa)

"Kalau bicara DP Rp 0 mohon maaf Pak Sarjoko (Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta), dari sisi peruntukan, ini tidak tepat sasaran," kata Gembong, Rabu (2/11).

Menurut Gembong, lebih baik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI bisa memanfaatkan anggaran untuk rusunawa

karena merupakan yang lebih penting bagi masyarakat dan jelas peruntukannya. "Saran saya kepada Dinas Perumahan DKI untuk fokus pada rumah susun sewa. Agar APBD kita bisa kita turunkan untuk bantu masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan," kata Gembong.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu menilai tidak tepat sasaran program Rumah DP Rp 0 karena syaratnya tidak masuk akal, seperti syarat minimum pendapatan yang terlalu tinggi hingga sulit dipenuhi oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). "Awalnya DP Rp 0 diperuntukkan rakyat miskin, MBR. Sekarang MBR mana yang berpenghasilan Rp 14 juta. Saya kira ini sudah bikin orang miskin lagi," katanya.

## Tak dianggarkan

Kepala Dinas PRKP DKI Jakarta

## Fakta Angka

675

Jumlah unit rusunawa yang akan dibangun pada 2023-2024

Sarjoko mengatakan, pembangunan rumah DP Rp 0 tidak dianggarkan dalam APBD 2023 mendatang. Menurut dia, Dinas PRKP mengusulkan pagu indikatif senilai Rp 1,22 triliun untuk penanganan kawasan kumuh dan pembangunan Rusunawa. "Bahwasanya pagu anggaran indikatif Rp 1,2 triliun adalah tidak untuk pembangunan hunian DP Rp 0," ujar Sarjoko.

Dalam agenda pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2023 di Grand Cempaka Resort, Bogor, Selasa (1/11), dia menjelaskan, pagu anggaran itu juga disiapkan untuk penataan Kali Ciliwung. "Pagu tersebut kami rencanakan untuk memanfaatkan untuk mempersiapkan hunian

an dalam mengantisipasi pelaksanaan penataan Kali Ciliwung," kata dia.

Sarjoko menjelaskan pihaknya akan membangun tiga menara rusun dengan total 675 unit yang akan dibangun dengan konsep bangunan ramah lingkungan. Dia melanjutkan, total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 544 miliar dengan menggunakan skema pembiayaan tahun jamak (*multiyears*) 2023-2024. Dia memerinci, pada 2023, anggaran yang dialokasikan sekitar Rp 217 miliar dan Rp 326 miliar pada 2024.

Meskipun tidak menganggarkan rumah DP Rp 0, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI akan mengajukan anggaran fasilitas pembiayaan perolehan rumah (FPPR) senilai Rp 176 miliar untuk disalurkan ke unit pengelola dana perumahan Dinas PRKP DKI. Setelah itu, kata dia, unit pengelola akan menyalurkan dana ke pengembang rumah DP Rp 0 melalui Bank DKI untuk digunakan membayar unit yang telah ada. Jika sudah dilakukan, kata dia, masyarakat akan membayarnya dengan skema cicilan ke Bank DKI.

■ antara ed: nur aini